

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* Djambatan, Jakarta.

M. Hadjon, Philipus, 1987, *Pelindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.

Perangin, Effendi, 1987, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.

- Saleh, Wantjik, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum edisi*, UGM Perss, Yogyakarta
- Sumarja, FX, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, “Hukum Adat Sketsa Asas” dan Ter Haar “Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat”, di dalam *Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur*, 2021, Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, Yogyakarta.
- Syarief, Elza. 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

Ardiansyah, Farangga Harki dan Alifitra, Tresia Elda, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt/2018)”, *Journal of Legal Research*, Vol.2. , No.2,2020.

Ariadi, Damar, “Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim.”, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No.5, Desember 2017.

Arliman, Laurensius, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia” , *Dialogia Luridica*, Vol.11, No.1, November 2019.

Ismail, Nurhasan, “Rechtsverwerking dan Pengapdosiaannya dalam Hukum Tanah Nasional” , *Mimbar Hukum*, Vol.19, No. 2, Juni 2007.

Juliandiva, Dicky Dwi dan Lina Jamilah, “Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Milik di Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. UU Nomor 5 Tahun 1960” , *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Jakarta 2016.

Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondang, dan Karel Yossi Umboh, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia” , *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 2022.

Panget, Ardiles Eric, “Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda.” , *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 3, 2013.

Porta, Rafael La, “Investor Protection and Cororate Governance” , *Journal of Financial Economics*, Nomor 58, Oktober 1999.

Ramadhani, Rahmah, “Pendaftaran Tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. ”, *Jurnal sosial dan ekonomi*, Vol.2, UMY Sumatera Utara, 2022.

Sadjarwo, Irsyadilla Hafizh Heru, “Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah” , *Jurnal Notaire*, Vol.3, No.1, Februari 2020 <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.19024>.

Safitri, Fina Ayu, Lita Tyesta ALW dan Anggita Doramia Lumbanjara, “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang.” , *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2. 2020.

Sudiro, Amoury A dan Ananda Prawira Putra, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan” , *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al-azhar Indonesia* Vol.V, No.1, Januari 2020.

Sukmawati, Putu Diva, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sui Generis*, Vol.2 ,No.2.

Sulengkampung, Syantica S, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah di Sepakati (Wanprestasi)” , *Lex Privatum*, Vol.8, No.1, 2020.

Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online.” , *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 6, No.8. 2018.

Yusyanti, Diana, “Pelindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *De Jure*, Vol. 20, No.40, Desember 2020
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembar Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076)

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembar Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Peraturan Menteri Agraria/Kantor Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Surat Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor MP.01.01/1126-32.600NII/2020, tanggal 28 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Garuda

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg perihal sengketa kepemilikan tanah di Jalan Kelurahan Garuda, 9 Februari 2021

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/PDT/2021/PT.BDG perihal pengajuan Banding putusan negeri Bandung Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.BDG. 13 Juli 2021

Putusan Kasasi Nomor 1741 K/Pdt/2022 perihal permohonan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/PDT/2021/PT.BDG. 29 Juni 2022

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 521 PK/Pdt/2023 perihal peninjauan kembali putusan banding Nomor 1741 K/Pdt/2022. 24 Agustus 2023.

Putusan Kasasi Nomor 234K/PDT/1992 perihal sengketa waris atas tanah sawah.

20 Desember 1993

Putusan Kasasi Nomor 1588 K/Pdt/2010. Perihal putusan Pengadilan Tinggi

Bandung Nomor 253/Pdt/2009/PT.Bdg. 5 Januari 2011

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan Kembali

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt/2018, perihal Peninjauan Kembali

ke-2 (dua) terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015

perihal sengketa tanah antara PT. Suzuki Indomobil melawan para ahli

waris dari pemilik tanah

E. Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Dewi, Anggita Mustika, 2019, *Perbandingan Pengaturan Pengalihfungsian Lahan*

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Kepentingan Umum

Antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Hukum UGM, Yogyakarta.

Fitriyani, Dwi Nurhayati, 2014, *Perlindungan hukum Bagi Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-sel)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Hukum UGM, Yogyakarta.

Hotijah, Nur, 2020, *Alat Bukti Hak Milik Atas Tanah yang Tanahnya Belum Bersertipikat*, Penulisan Hukum, Program Studi Sarjana Universitas Jember, Jember.

Riyanto, Ahmad, 2020, *Novum Sebagai Dasar Upaya Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Kepemilikan (Studi Putusan Perkara Nomor 40 PK/Pdt/2003)*, Penulisan Hukum, Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.

F. Internet

Keputusan Menteri pada Website JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
[https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/kepmen?page=9#:~:text=Keputusan%20Menteri%20\(disingkat%20Kepmen\)%20adalah,berlaku%20sekali%20selesai%20\(enmahlig\)](https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/kepmen?page=9#:~:text=Keputusan%20Menteri%20(disingkat%20Kepmen)%20adalah,berlaku%20sekali%20selesai%20(enmahlig)). Diakses pada 18 Juni.

Sejarah Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. <https://dukcap.Bil.kemendagri.go.id/page/read/sejarah-kementerian-dalam-negeri>
Diakses pada 20 Juni.

Penjelasan mengenai Sejarah Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru).
<https://dki.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/52/yuk-kita-simak-sejarah-hari-agraria-dan-tata-ruang-nasional-hantaru> Diakses pada 24 Mei 2024

G. Makalah

Laksamana, Rofiq, “Rekonstruksi Konsep Rechtsverwerking Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah”, Makalah disampaikan dalam acara Diskusi Bulanan PPPM – STPN, Yogyakarta, 22 Oktober 2014.